

ANALISIS PERFORMA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Makdalena Renahuremba¹, George M.V. Kawung², Krest D. Tolosang³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : makdalena2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performan keuangan daerah di Kabupaten Boven Digoel. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait, yakni mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu 2014-2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun alat analisisnya adalah Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah, Rasio Kemandirian Keuda, Rasio Ketergantungan Keuda, dan Rasio DDF. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari tahun 2014-2017 PAD pertumbuhannya meningkat, TPD mencapai pertumbuhan positif, Tingkat Kemandirian Keuda relatif rendah tetapi terjadi peningkatan, Tingkat ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat masih tinggi akan tetapi rasio semakin rendah, dan Rasio DDF masih rendah akan tetapi semakin baik. Secara keseluruhan performa keudanya masih terbatas dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel lebih mengefektifkan perolehan sumber PAD yang sudah ada dan mampu menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, APBD.

ABSTRACT

This study aims to determine the regional financial performance in Boven Digoel Regency. The data used is secondary data from relevant government agencies, namely the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in the 2014-2017 period. The analytical method used in this research is descriptive and quantitative analysis methods. The analysis tools are PAD Growth, Total Regional Income Growth, Self-reliance Ratio, Second Dependency Ratio, and DDF Ratio. The results of the descriptive analysis show that from 2014-2017 PAD growth increased, TPD achieved positive growth, Keuda's level of independence was relatively low but increased, the level of dependence on central government funds was still high but the ratio was getting lower, and the DDF ratio was still low but growing. good. Overall, their performance is still limited in financing their own government administration activities in their regions. For this reason, it is hoped that the local government of Boven Digoel Regency will make the acquisition of existing PAD sources more effective and be able to explore the potentials of new sources of local revenue by utilizing existing resources, so as to increase the revenue of Regional Original Revenue.

Key words: Regional Financial Independence, Regional Financial Dependence, Degree of Fiscal Decentralization, APBD.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Halim (2004), dengan dikeluarkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah menurut Suparmoko (2011) berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), - Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)),
- Pinjaman Daerah,
- Dana Dekonsentrasi, dan
- Dana Tugas Pembantuan.

Tiga sumber dana yang pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan sumber dana lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi sumber pendanaan bagi pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Dari Pendapatan Yang Sah.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti bahwa seiring dengan berjalannya otonomi, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai berkurang dan yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah adalah pendapatan dari daerah sendiri. Potensi daerah besarnya jumlah tenaga kerja di kabupaten boven digoel merupakan gambaran besarnya penawaran tenaga kerja di wilayah ini.

Pendapatan asli daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kemampuan perolehan PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerahnya semakin baik. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Mahmudi, (2010).

Kabupaten Boven Digoel sebagai daerah yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan tidak lepas dari keadaan ini. Perkembangan pendapatan jdaerah Kabupaten Boven Digoel ditunjukkan pada Tabel 1.1. Pada tabel tersebut menunjukkan perkembangan PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah. Penerimaan PAD terjadi fluktuasi, Tahun 2014 sebesar Rp 13 milyar menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 11,6 milyar, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 22,6 milyar dan pada tahun 2017 mencapai Rp 26,5 milyar. Dana Perimbangan mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 sebesar Rp 881,5 milyar meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp 922 milyar dan pada tahun 2016 meningkat

menjadi sebesar 1025,6 milyar dan pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi Rp 999,7 milyar. Pendapatan lain-lain yang sah juga terjadi fluktuasi, pada tahun 2014 mencapai Rp 130,8 milyar kemudian terjadi penurunan pada tahun 2015 hanya mencapai Rp 23,5 milyar yang kemudian meningkat pada tahun 2016 mencapai Rp 181,3 milyar dan pada tahun 2017 meningkat mencapai Rp 224,5 milyar.

Tabel 1 Perkembangan PAD, Dana Perimbangan Dan LLPYS Kabupaten Boven Digoel Tahun 2014 – 2017 (Rp Milyar)

TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN	LLPYS	TOTAL PENDAPATAN DAERAH
2014	13.0	881.5	130.8	1025.3
2015	11.6	922.1	23.5	957.2
2016	22.6	1025.6	181.3	1230.4
2017	26.5	999.7	224.5	1250.7

Sumber : BPS Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, data diolah

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengidentifikasi performa keuangan daerah Kabupaten Boven Digoel di era otonomi daerah khususnya tahun 2014-2017 yang dilihat dari indikator Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib

yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Prakosa, 2004). Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah. Sumber-sumber PAD di atas memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan. Namun demikian kontribusi terbesar dalam menyumbang penerimaan PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai sumber utama PAD, pemerintah senantiasa mendorong peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan keadaan. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data *time series* berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel tahun 2014-2017, Kependudukan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Boven Digoel tahun 2018.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi dan memfokuskan pada performa keuangan daerah yang menunjukkan pertumbuhan PAD, pertumbuhan Total Pendapatan Daerah, kemandirian, ketergantungan dan tingkat derajat desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Boven Digoel dengan data yang digunakan merupakan data tahunan tahun 2014 sampai tahun 2017.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel penelitian dan definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (gPAD). Pertumbuhan PAD adalah ukuran yang menunjukkan perubahan PAD dari suatu ke tahun berikutnya, yang nilai bisa positif, berarti peningkatan penerimaan PAD dan atau negatif berarti terjadi penurunan penerimaan PAD.
2. Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah (gTPD). Pertumbuhan TPD adalah ukuran yang menunjukkan perubahan TPD dari suatu tahun ke tahun berikutnya, nilainya bisa positif berarti terjadi peningkatan perolehan TPD dan atau negatif berarti terjadi penurunan perolehan TPD
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.
4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi.
5. Rasio Desentralisasi Fiskal, Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif didasarkan pada studi literatur melalui artikel, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan dalam analisis kuantitatifnya digunakan model Rasio dan Trend dengan bantuan Microsoft Excel untuk mencerminkan hasil dan pembahasan yang dinyatakan dalam angka.

➤ Model Analisis Rasio

Untuk mengetahui performa kemampuan keuangan daerah digunakan Analisis Pendapatan dengan rumus/formula sebagai berikut, Mahmudi, (2010).

1. Analisis Pertumbuhan PAD

Analisis pertumbuhan PAD bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, mengalami pertumbuhan PAD secara positif ataukah negatif.

$$\text{Pertumbuhan PAD}_t = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\% \tag{3.1}$$

2. Analisis Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan}_t = \text{Pendapatan}_t - \text{Pendapatan}_{t-1} \tag{3.1}$$

$$\frac{\text{Pendapatan}_{t-1}}{\text{Pendapatan}_{t-1}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKmKD) :
Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah.

$$\text{Rasio KmKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\% \quad (3.3)$$

4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKgKD):
Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

$$\text{RKgKD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (3.4)$$

5. Rasio Derajat Desentralisasi :
Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi Nilai Rasio menunjukkan kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (3.5)$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Performa Keuangan Daerah Kabupaten Boven Digoel

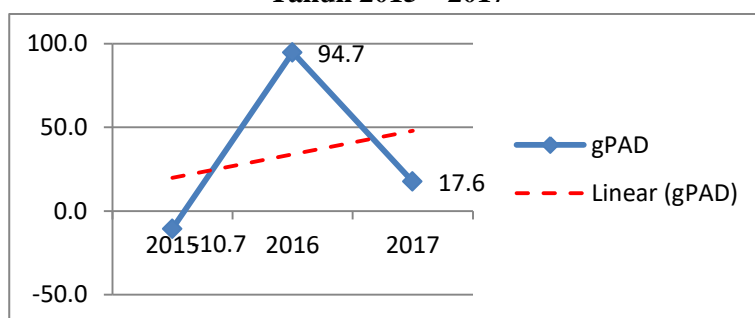
Untuk mengetahui performa kemampuan keuangan daerah digunakan Analisis Pendapatan dan Belanja dengan Model Analisis Rasio, Mahmudi, (2010). Berikut ini akan dipaparkan performa keuangan daerah Kabupaten Boven Digoel.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

Perkembangan pertumbuhan total pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel. Pada gambar 4.5 menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah terjadi fluktuasi yang tajam. Pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan negatif – 10,7 %, dan pada tahun 2016 terjadi lonjakan dimana pertumbuhan mencapai 94,7 % dan tahun 2017 terjadi penurunan pertumbuhan pendapatan dengan capaian pertumbuhan sebesar 17,6 %. Secara keseluruhan pertumbuhan pendapatan daerah memiliki trend yang positif dan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 33,9 %.

Gambar 1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 – 2017

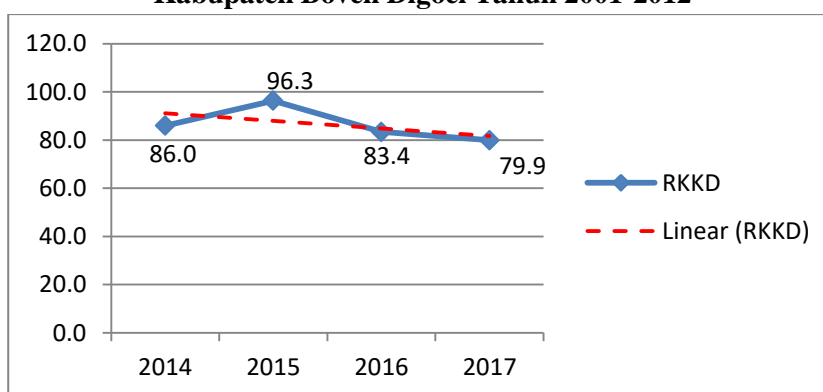


Sumber : BPS Kabupaten Boven Digoel 2018, data diolah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKgKD)

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Gambar 1 memperlihatkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Secara keseluruhan Rasio ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan masih sangat besar. Rasio angka ketergantungan berkisar 77,6 – 98,8 persen dengan trend negative/menurun. Dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dari aspek Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Kabupaten Boven Digoel masih sangat bergantung dari dana transfer Pemerintah Pusat dan ketergantungannya semakin berkurang.

**Gambar 2
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2012**



Sumber : BPS Kabupaten Boven Digoel 2018, data diolah

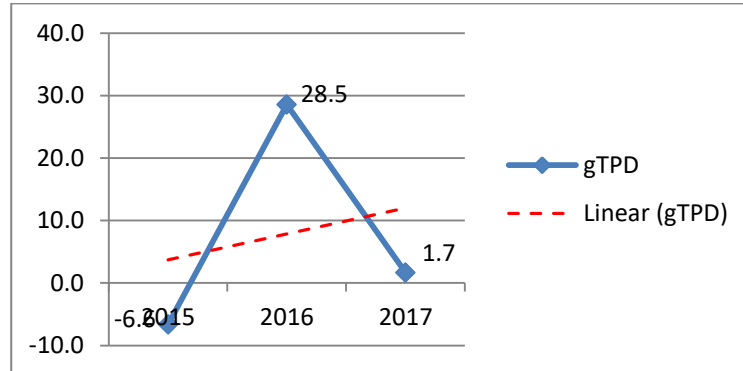
Analisis Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah (TPD)

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

Perkembangan pertumbuhan total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar 4.6. Pada gambar 2 menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah terjadi fluktuasi yang tajam. Pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan negatif – 6,6 %, dan pada tahun 2016 terjadi lonjakan dimana pertumbuhan mencapai 28,5 % dan tahun 2017 terjadi penurunan pertumbuhan pendapatan dengan capaian pertumbuhan sebesar 1,7 %. Secara keseluruhan pertumbuhan pendapatan

daerah memiliki trend yang positif dan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,9 %.

Gambar 3
Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah (TPD)
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 – 2017

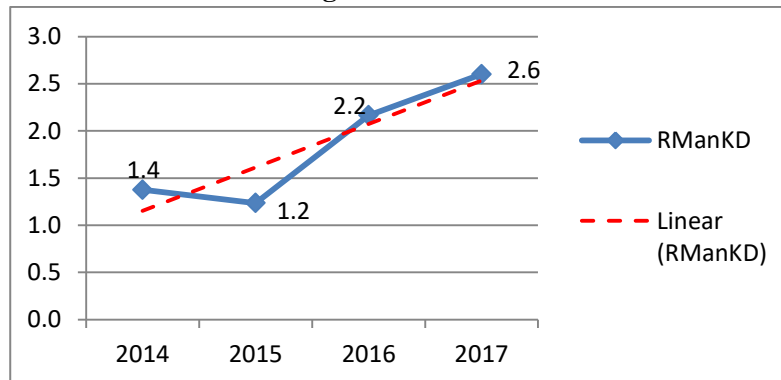


Sumber : BPS Kabupaten Boven Digoel 2018, data diolah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKmKD)

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan daerah. Pada gambar 3 dapat dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Boven Digoel dari tahun 2014-2017. Performa keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukkan dengan garis tren yang positif. Secara keseluruhan rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah, yaitu hanya berkisar antara 1,4 – 2,8 %.

Gambar 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2014-2017



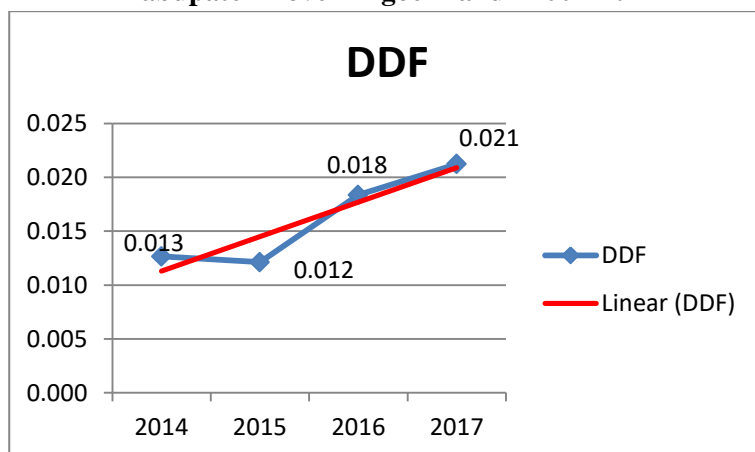
Sumber : BPS Kabupaten Boven Digoel 2018, data diolah

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDFF)

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah. Pada gambar 4 dapat dilihat rasio dan trend derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah Kabupaten Boven Digoel dari tahun 2014-2017. Performa keuangan daerah ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat semakin baik dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio yang meningkat dengan garis tren yang positif. Secara keseluruhan rasio derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah masih rendah, yaitu hanya berkisar kurang dari 1 persen.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Keuangan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2012



Sumber : BPS Kabupaten Boven Digoel 2018, data diolah.

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi peningkatan pertumbuhan dengan fluktuasi yang tajam, akan tetapi mencapai pertumbuhan rata yang positif.
2. Total Pendapatan Daerah (TPD) mengalami tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi, akan tetapi mencapai pertumbuhan yang positif.
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKmKD) masih relatif rendah, akan tetapi mengalami peningkatan yang menunjukkan kemampuan kemandirian semakin meningkat.
4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKgKD) menunjukkan masih tingkat ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat, akan tetapi tingkat ketergantungan semakin berkurang/menurun.
5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDDF) relatif masih rendah, akan tetapi terjadi peningkatan yang menunjukkan semakin baik dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel 2015/2016/2017/2018.
- Cheris Enjelita Kaunang, dkk., 2016. kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi pada kota manado (tahun 2010-2014).
- Halim, Abdul, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Julius Tamawiy, Jullie J Sondakh, Jessy D.L Warongan Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara).
- Kaunang E. Cheris, dkk. 2016. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat

- Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah Di Kota Manado Tahun 2010-2014. Skripsi FEB UNSRAT. Manado.
- Kamaroellah R. Agoes. 2017 Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal NUANSA Volume 14 No. 1.
- Kawung M. V. George. 2008. Analisis Kemampuan dan Tingkat Ketergantungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pada Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal FORMAS Volume 1, No.4, 2008. Malang.
- Kuncoro Thesaurianto. 2007. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- La Ode Abdul Wahab, dkk., 2016. kemampuan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Jayapura khususnya tahun 2010-2014.
- Mahmudi, 2010, Manajemen Analisis Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Prihatiningsih Ana. 2010. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta. Skripsi. FE Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Rara Mianti1, Dr. Fachruzzaman, SE, MDM, Ak 2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah SeProvinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir.
- Riri S. Putri. 2018. Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Keuangan Daerah Menurut Perspektif Islam Di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Skripsi. FEBI Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Suparmoko,. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Suparmoko, 2011. Keuangan Negara, Edisi Keenam, BPFE, Yogyakarta.
- Susanto Hery. 2014. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Organisasi Dan Manajemen. Volume 10, No. 1. 2014. Lombok.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.